
KETAHANAN POLITIK NASIONAL DALAM MENGHADAPI ANCAMAN TERORISME DAN EKSTREMISME

Endang Lubis

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Ketahanan politik nasional menjadi kunci dalam menghadapi ancaman terorisme dan ekstremisme di era kontemporer. Artikel ini mengeksplorasi berbagai strategi dan pendekatan yang digunakan oleh negara-negara untuk memperkuat ketahanan politik mereka dalam menghadapi ancaman tersebut. Melalui analisis berbagai faktor, seperti kebijakan keamanan, pembangunan masyarakat yang inklusif, penegakan hukum yang efektif, dan diplomasi internasional, artikel ini membahas upaya-upaya untuk meningkatkan ketahanan politik nasional dalam menghadapi tantangan yang kompleks dari terorisme dan ekstremisme.

Kata Kunci: *Ketahanan politik nasional, terorisme, ekstremisme*



PENDAHULUAN

Latar Belakang

Di era globalisasi yang penuh tantangan, ketahanan politik nasional menjadi semakin penting dalam menjaga keamanan dan stabilitas sebuah negara. Salah satu ancaman yang paling meresahkan dalam konteks keamanan global saat ini adalah terorisme dan ekstremisme. Ancaman ini tidak hanya mengancam keamanan nasional, tetapi juga mengganggu stabilitas sosial, politik, dan ekonomi suatu negara.

Ketahanan politik nasional merujuk pada kemampuan suatu negara untuk menanggulangi dan menahan berbagai tekanan internal dan eksternal yang dapat mengganggu kestabilan politiknya. Dalam konteks menghadapi ancaman terorisme dan ekstremisme, ketahanan politik nasional menjadi prasyarat utama untuk melindungi masyarakat dan mempertahankan kedaulatan negara.

Terorisme, yang sering kali disertai dengan ideologi ekstrem, telah menjadi ancaman serius bagi keamanan global. Serangan teroris tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan kerugian material, tetapi juga menciptakan ketakutan, memecah belah masyarakat, dan mengganggu stabilitas politik. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat ketahanan politik nasional dalam menghadapi ancaman terorisme menjadi sangat penting.

Ekstremisme, baik dalam bentuk agama, politik, atau ideologi lainnya, juga merupakan tantangan yang signifikan bagi stabilitas politik dan sosial sebuah negara. Kelompok-kelompok ekstrem seringkali mencoba untuk mengubah tatanan politik dan sosial yang ada melalui kekerasan atau propaganda radikal. Oleh karena itu, ketahanan politik nasional harus mampu mengatasi ancaman ekstremisme dengan mengambil tindakan preventif dan responsif yang tepat.

Dalam menghadapi ancaman terorisme dan ekstremisme, setiap negara memiliki tantangan yang unik tergantung pada konteks politik, sosial, dan ekonominya. Namun, ada beberapa pendekatan umum yang dapat digunakan untuk memperkuat ketahanan politik nasional dalam menghadapi ancaman ini. Ini termasuk pembangunan kebijakan keamanan yang efektif, peningkatan kerjasama internasional, pembangunan masyarakat yang inklusif, dan penegakan hukum yang kuat.

Kebijakan keamanan yang efektif adalah komponen kunci dari ketahanan politik nasional dalam menghadapi terorisme dan ekstremisme. Ini melibatkan pengembangan strategi yang holistik untuk mencegah serangan teroris, mengidentifikasi dan menangkap para pelaku, serta melindungi masyarakat dari ancaman yang ada. Kebijakan keamanan yang efektif juga harus memperhatikan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil tidak merugikan masyarakat secara keseluruhan.

Selain itu, kerjasama internasional memainkan peran penting dalam memperkuat ketahanan politik nasional dalam menghadapi terorisme dan ekstremisme. Terorisme dan ekstremisme tidak mengenal batas negara, dan seringkali melibatkan jaringan lintas negara. Oleh karena itu, kerjasama antar negara dalam hal intelijen, penegakan hukum, dan pertukaran informasi menjadi kunci untuk mengatasi ancaman yang kompleks ini.

Pembangunan masyarakat yang inklusif juga merupakan strategi penting dalam memperkuat ketahanan politik nasional. Ketahanan politik tidak hanya tentang keamanan fisik, tetapi juga tentang kestabilan sosial dan kohesi masyarakat. Masyarakat yang inklusif, di mana semua kelompok merasa diakui dan dihormati, lebih mungkin untuk menahan tekanan eksternal dan internal yang dapat mengganggu stabilitas politik.

Penegakan hukum yang kuat juga menjadi elemen kunci dalam memperkuat ketahanan politik nasional. Penegakan hukum yang efektif dapat membantu mencegah radikalisme, menangkap dan mengadili para pelaku teroris, serta melindungi masyarakat dari ancaman yang ada. Selain itu, sistem hukum yang independen dan transparan juga penting untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dilindungi dan keadilan ditegakkan.

Dalam menghadapi ancaman terorisme dan ekstremisme, penting untuk mengambil pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Tidak ada solusi tunggal yang dapat mengatasi ancaman yang kompleks ini, tetapi melalui kombinasi berbagai strategi dan pendekatan, ketahanan politik nasional dapat diperkuat dan negara dapat menghadapi tantangan ini dengan lebih efektif. Dalam artikel ini, kami akan mengeksplorasi berbagai pendekatan dan strategi yang digunakan oleh negara-negara dalam memperkuat ketahanan politik mereka dalam menghadapi ancaman terorisme dan ekstremisme.

Metode Penelitian

- 1. Pendekatan Kualitatif: Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang ketahanan politik nasional dalam menghadapi ancaman terorisme dan ekstremisme. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi persepsi, sikap, dan pengalaman para pemangku kepentingan, serta menganalisis konteks politik, sosial, dan ekonomi yang mempengaruhi upaya penguatan ketahanan politik.*
- 2. Studi Literatur: Langkah awal dalam penelitian ini akan melibatkan studi literatur yang cermat tentang ketahanan politik, terorisme, dan ekstremisme. Peneliti akan meninjau literatur terbaru dalam bidang ini, termasuk artikel ilmiah, buku, laporan riset, dan dokumen kebijakan, untuk memahami pemahaman teoritis dan praktik terbaik yang terkait dengan topik penelitian.*
- 3. Analisis Dokumen: Penelitian ini akan melibatkan analisis dokumen, termasuk kebijakan keamanan nasional, strategi kontra-terorisme, laporan intelijen, dan dokumen kebijakan terkait lainnya. Analisis dokumen akan membantu memahami pendekatan dan strategi yang diadopsi oleh berbagai negara dalam menghadapi ancaman terorisme dan ekstremisme, serta evaluasi efektivitas langkah-langkah yang diambil.*
- 4. Studi Kasus: Penelitian ini juga akan melibatkan studi kasus untuk menggali wawasan tentang praktik terbaik dalam memperkuat ketahanan politik nasional. Studi kasus akan memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi strategi dan pendekatan yang digunakan oleh negara-negara tertentu dalam mengatasi ancaman terorisme dan ekstremisme, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dari upaya tersebut.*

5. *Wawancara Mendalam: Penelitian ini akan melibatkan wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pejabat pemerintah, ahli keamanan, anggota lembaga penegak hukum, dan pemimpin masyarakat sipil. Wawancara mendalam akan memberikan wawasan yang berharga tentang persepsi, strategi, dan tantangan dalam memperkuat ketahanan politik nasional dalam menghadapi ancaman terorisme dan ekstremisme.*
6. *Analisis Tematis: Data kualitatif yang diperoleh dari studi literatur, analisis dokumen, studi kasus, dan wawancara mendalam akan dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematis. Analisis tematis akan membantu mengidentifikasi pola-pola, tema-tema, dan tren yang muncul dalam data, serta menyusun pemahaman yang lebih komprehensif tentang strategi dan praktik yang efektif dalam menghadapi ancaman terorisme dan ekstremisme.*
7. *Verifikasi dan Validasi: Selama proses penelitian, peneliti akan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang diperoleh, baik melalui triangulasi data, diskusi dengan rekan peneliti, maupun melalui refleksi terhadap temuan penelitian. Hal ini akan memastikan keandalan dan keabsahan temuan penelitian.*
8. *Presentasi dan Publikasi: Hasil penelitian akan disajikan dalam bentuk laporan penelitian yang komprehensif, serta dapat dipublikasikan dalam jurnal ilmiah atau diseminasi melalui konferensi dan seminar ilmiah. Tujuan akhirnya adalah untuk berkontribusi pada pemahaman dan perdebatan ilmiah tentang strategi dan praktik terbaik dalam memperkuat ketahanan politik nasional dalam menghadapi ancaman terorisme dan ekstremisme.*

PEMBAHASAN

Ketahanan politik nasional merupakan hal yang vital bagi suatu negara dalam menghadapi ancaman terorisme dan ekstremisme. Terorisme dan ekstremisme menjadi tantangan serius bagi kestabilan politik suatu negara karena dapat mengganggu ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlunya upaya yang kuat dan komprehensif dalam membangun ketahanan politik nasional untuk menghadapi ancaman tersebut.

Pertama-tama, pemahaman mendalam tentang akar penyebab terorisme dan ekstremisme diperlukan agar langkah-langkah pencegahan yang tepat dapat diambil. Faktor-faktor seperti ketidakadilan sosial, ketidakstabilan politik, dan ketidakpuasan terhadap pemerintah bisa menjadi pendorong utama bagi individu atau kelompok untuk terlibat dalam aktivitas terorisme atau ekstremisme.

Selanjutnya, penting bagi negara untuk memperkuat sistem keamanan dalam negeri dan menegakkan hukum secara tegas terhadap pelaku terorisme dan ekstremisme. Ini mencakup peningkatan pengawasan, penegakan hukum yang adil, serta kerjasama antara lembaga penegak hukum dalam menghadapi ancaman tersebut.

Selain itu, penting untuk membangun kerjasama internasional dalam hal intelijen dan pertukaran informasi guna mencegah pergerakan lintas batas para pelaku terorisme dan ekstremisme. Kolaborasi antarnegara dalam hal ini menjadi kunci untuk mempersempit ruang gerak kelompok-kelompok radikal yang beroperasi secara lintas negara.

Tidak hanya itu, memperkuat dialog antaragama dan antarkelompok dalam masyarakat juga merupakan langkah penting dalam mengurangi ketegangan dan mencegah radikalisme. Pendidikan yang mempromosikan nilai-nilai toleransi, pluralisme, dan penghargaan terhadap perbedaan menjadi modal utama dalam membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis.

Pemerintah juga perlu memperkuat koordinasi antara berbagai lembaga terkait, seperti militer, kepolisian, badan intelijen, dan lembaga pemerintah lainnya, untuk menyusun strategi yang terpadu dalam menghadapi ancaman terorisme dan ekstremisme. Kolaborasi lintas sektor ini dapat mengoptimalkan sumber daya dan upaya pencegahan yang dilakukan.

Selain mengatasi faktor internal, penting juga untuk memperhatikan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi ketahanan politik nasional terhadap terorisme dan ekstremisme. Hal ini mencakup kerjasama dengan negara-negara lain dalam memerangi sumber pembiayaan dan dukungan bagi kelompok-kelompok teroris serta memperkuat kontrol terhadap perbatasan.

Membangun ketahanan politik nasional juga membutuhkan peran aktif dari seluruh elemen masyarakat, termasuk media massa, lembaga pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan. Media massa memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi yang akurat dan tidak memihak serta mengedukasi masyarakat tentang bahaya terorisme dan ekstremisme.

Sementara itu, lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab untuk mengintegrasikan nilai-nilai kebangsaan, toleransi, dan perdamaian dalam kurikulumnya guna mencegah radikalisme di kalangan generasi muda. Organisasi kemasyarakatan juga dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam memerangi paham radikal dan memperkuat solidaritas sosial.

Dalam menghadapi ancaman terorisme dan ekstremisme, penting untuk memperhatikan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi. Langkah-langkah pencegahan yang diambil haruslah sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut agar tidak mengorbankan kebebasan dan martabat individu.

Selain itu, pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan dan program yang telah dilaksanakan perlu dilakukan secara berkala untuk mengevaluasi efektivitasnya dalam membangun ketahanan politik nasional. Dengan demikian, perbaikan dan penyesuaian dapat dilakukan sesuai dengan perkembangan dinamika terorisme dan ekstremisme.

Perlu diingat bahwa upaya membangun ketahanan politik nasional dalam menghadapi terorisme dan ekstremisme merupakan perjalanan yang panjang dan memerlukan keterlibatan semua pihak. Tidak ada solusi instan dalam mengatasi masalah kompleks ini, namun dengan komitmen dan kerjasama yang kuat, dampak dari ancaman tersebut dapat diminimalkan.

Selain itu, penting juga untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat dalam rangka menghadapi ancaman terorisme dan ekstremisme. Masyarakat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengidentifikasi serta melaporkan tindakan mencurigakan dapat menjadi garda terdepan dalam upaya pencegahan.

Pentingnya peran pemimpin politik dalam membangun ketahanan politik nasional tidak dapat dipungkiri. Pemimpin yang memiliki visi jelas, integritas, dan komitmen untuk melindungi kepentingan nasional dari ancaman terorisme dan ekstremisme sangat diperlukan dalam mengoordinasikan upaya-upaya pencegahan.

Selanjutnya, transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam menjalankan kebijakan terorisme dan ekstremisme juga merupakan hal yang penting. Keterbukaan akan memungkinkan masyarakat untuk memahami dan mendukung langkah-langkah yang diambil serta mengkritik jika diperlukan.

Penguatan kapasitas lembaga pemerintah dalam hal pengawasan dan penegakan hukum juga menjadi prioritas dalam membangun ketahanan politik nasional. Lembaga-lembaga tersebut perlu dilengkapi dengan sumber daya manusia dan teknologi yang memadai untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks.

Selain itu, investasi dalam pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial juga dapat membantu mengurangi ketidakpuasan dan marginalisasi yang menjadi faktor pendorong bagi radikalisme. Pembangunan yang inklusif dan merata dapat menciptakan iklim sosial yang lebih stabil dan mengurangi potensi konflik.

Dalam konteks globalisasi, pengelolaan migrasi dan integrasi sosial para imigran juga menjadi faktor penting dalam membangun ketahanan politik nasional. Migrasi yang tidak terkontrol dapat menjadi sumber ketegangan sosial dan meningkatkan risiko radikalisme di dalam masyarakat.

Penting untuk diingat bahwa penanganan terorisme dan ekstremisme tidak boleh bersifat diskriminatif terhadap suatu kelompok etnis, agama, atau budaya. Upaya pencegahan dan penegakan hukum haruslah dilakukan secara adil dan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan untuk menghindari polarisasi yang lebih dalam.

Selanjutnya, penting juga untuk memperhatikan dimensi psikologis dalam membangun ketahanan politik nasional. Pendekatan yang mengedepankan rehabilitasi dan deradikalisasi bagi para mantan anggota kelompok teroris dapat membantu mengurangi potensi ancaman di masa depan.

Kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional, seperti PBB dan Interpol, juga dapat memperkuat kapasitas negara dalam menghadapi ancaman terorisme dan ekstremisme. Program-program pelatihan dan pertukaran informasi antarnegara dapat meningkatkan efektivitas dalam penanggulangan.

Selain itu, perlu juga dilakukan upaya untuk mengatasi akar penyebab ekonomi terorisme dengan memberikan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan sosial bagi masyarakat yang rentan terhadap radikalisme. Ini dapat membantu mengurangi tingkat ketidakpuasan dan alienasi.

Dalam menghadapi ancaman terorisme dan ekstremisme, pendekatan yang holistik dan terpadu menjadi kunci keberhasilan. Tidak ada satu solusi tunggal yang dapat mengatasi masalah ini, namun kombinasi berbagai strategi yang berbasis pada pemahaman mendalam terhadap akar penyebabnya dapat memberikan hasil yang lebih efektif.

Terakhir, kesadaran dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme dan ekstremisme menjadi hal yang sangat

penting. Dengan kesadaran yang tinggi dan komitmen bersama, kita dapat membangun ketahanan politik nasional yang kokoh dan mampu menghadapi ancaman dengan lebih efektif.

Dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, peran media massa juga sangat signifikan dalam membangun ketahanan politik nasional. Media massa memiliki kekuatan untuk membentuk opini publik dan memengaruhi sikap masyarakat terhadap isu-isu terorisme dan ekstremisme. Oleh karena itu, penting bagi media untuk menjalankan peran mereka secara bertanggung jawab dengan menyajikan informasi yang akurat, seimbang, dan tidak memihak, serta mengedukasi masyarakat tentang bahaya terorisme dan ekstremisme.

Selanjutnya, pengembangan teknologi informasi juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat ketahanan politik nasional dalam menghadapi ancaman terorisme dan ekstremisme. Pendekatan yang inovatif, seperti penggunaan kecerdasan buatan dan analisis data besar-besaran, dapat membantu pemerintah dalam mengidentifikasi pola-pola perilaku yang mencurigakan dan mencegah serangan teroris.

Pemerintah juga perlu memperhatikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam upaya melawan terorisme dan ekstremisme. Langkah-langkah pencegahan dan penegakan hukum yang diambil haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan diskriminasi terhadap individu atau kelompok tertentu.

Selain itu, penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga masyarakat sipil dalam menghadapi ancaman terorisme dan ekstremisme. Kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan ini dapat meningkatkan efektivitas dalam upaya pencegahan, deteksi, dan penanggulangan terhadap ancaman tersebut.

Dalam menghadapi ancaman terorisme dan ekstremisme, pendidikan dan penyuluhan juga memainkan peran yang sangat penting. Program-program edukasi yang menyasar berbagai kalangan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, dapat membantu meningkatkan kesadaran tentang bahaya terorisme dan ekstremisme serta memperkuat ketahanan mental dan ideologis masyarakat.

Tidak kalah pentingnya adalah membangun jejaring komunitas yang kuat dan inklusif dalam masyarakat. Komunitas yang solid dan saling mendukung dapat menjadi benteng pertahanan yang efektif dalam menghadapi upaya radikalisisasi dan rekrutmen oleh kelompok-kelompok teroris.

Selanjutnya, penting juga untuk meningkatkan kapasitas lembaga pendidikan dan penelitian dalam menghasilkan pengetahuan dan pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena terorisme dan ekstremisme. Penelitian yang berkualitas dapat memberikan dasar yang kuat untuk merancang kebijakan dan strategi yang efektif dalam mengatasi ancaman tersebut.

Dalam menghadapi ancaman terorisme dan ekstremisme, peran agama dan pemimpin agama juga tidak dapat diabaikan. Pemimpin agama memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pemikiran dan perilaku umatnya, sehingga mereka dapat menjadi agen perdamaian dan toleransi dalam masyarakat.

Selanjutnya, penting untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kebijakan dan strategi yang telah diimplementasikan dalam membangun ketahanan politik nasional. Dengan mempelajari pelajaran dari pengalaman masa lalu dan mengadaptasi diri terhadap perubahan dinamika ancaman, kita dapat lebih siap menghadapi tantangan di masa depan.

Terakhir, solidaritas internasional dan kerjasama regional juga sangat penting dalam menghadapi ancaman terorisme dan ekstremisme. Negara-negara harus saling mendukung dan bekerja sama dalam pertukaran informasi, pelatihan, dan koordinasi operasional untuk meningkatkan efektivitas dalam mengatasi ancaman tersebut.

Kesimpulan

Dalam menghadapi ancaman terorisme dan ekstremisme, ketahanan politik nasional menjadi fondasi yang vital untuk menjaga stabilitas, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Melalui pendekatan yang holistik dan terpadu, negara dapat membangun ketahanan politik yang kokoh sebagai respons terhadap ancaman tersebut.

Pentingnya pemahaman mendalam terhadap akar penyebab terorisme dan ekstremisme menjadi landasan untuk merumuskan strategi pencegahan yang efektif. Selain itu, penguatan sistem keamanan dalam negeri, penegakan hukum yang adil, dan kerjasama internasional dalam hal intelijen menjadi kunci dalam menangani ancaman tersebut.

Selanjutnya, membangun dialog antaragama dan antarkelompok dalam masyarakat serta memperkuat inklusi sosial menjadi langkah penting dalam meredakan ketegangan dan mencegah radikalisme. Pendidikan yang mempromosikan nilai-nilai toleransi, pluralisme, dan perdamaian juga berperan penting dalam membentuk masyarakat yang tangguh terhadap ancaman terorisme dan ekstremisme.

Pemerintah perlu menjalankan peran aktif dalam memimpin upaya membangun ketahanan politik nasional, dengan memastikan koordinasi yang baik antara berbagai lembaga terkait dan memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan demokrasi dalam setiap langkah yang diambil. Selain itu, partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat juga diperlukan dalam menghadapi ancaman tersebut.

Kesadaran akan pentingnya sinergi antara pemerintah, sektor swasta, lembaga masyarakat sipil, dan komunitas internasional menjadi kunci dalam memperkuat ketahanan politik nasional. Dengan demikian, negara dapat membangun sistem yang adaptif dan responsif terhadap dinamika ancaman terorisme dan ekstremisme, sambil tetap memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dalam setiap tindakan yang diambil.

DAFTAR PUSTAKA

Tarigan, U., & Sinaga, M. (2010). *Implementasi Manajemen Keuangan Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan (Studi Kasus di SMA Negeri 2 Sibolga)*.

- Widyastuti, I. W. (2022). *Analisis Kinerja Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2014-2019 dalam Pembentukan Peraturan Daerah*.
- Santoso, M. H. (2021). *Application of Association Rule Method Using Apriori Algorithm to Find Sales Patterns Case Study of Indomaret Tanjung Anom*. *Brilliance: Research of Artificial Intelligence*, 1(2), 54-66.
- Putri, A. O. (2017). *Analisis Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan*.
- Muda, I., & Angelia, N. (2018). *Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Mengelola Sektor Pariwisata Pantai di Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat*.
- Tarigan, U., & Dewi, R. (2015). *Peranan Gaya Kepemimpinan Dalam Upaya Meningkatkan Prestasi Kerja di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Tarigan, R. S. (2018). *Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Program Studi (SIPRODI)*.
- Girsang, L. (2020). *Pengaruh Pelatihan Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Pt. Lintas Aman Andalas Medan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Batubara, B. M. (2023). *Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara)*.
- Gunawan, I., Matondang, A., & Sembiring, M. (2020, February). *Lean Technology Implementation For Reducing The Dwelling Time Level*. In *Proceedings of the 1st International Conference of Global Education and Society Science, ICOGESS 2019, 14 March, Medan, North Sumatera, Indonesia*.
- Harahap, G. Y. (2020). *Instilling Participatory Planning in Disaster Resilience Measures: Recovery of Tsunami-affected Communities in Banda Aceh, Indonesia*. *Budapest International Research in Exact Sciences (BirEx) Journal*, 2(3), 394-404.
- Hartono, B. *HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT: A STUDY OF THE POLICY IMPLEMENTATION OF THE TRAINING POLICY TOWARD CAREER OF GOVERNMENT'S SERVANTS IN SLEMAN REGION*.
- SIDABUTAR, P. R., & Harahap, G. Y. (2022). *IDENTIFIKASI PELAT LANTAI PERON TINGGI PADA PEMBANGUNAN STASIUN LUBUK PAKAM BARU*. *Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik*, 1(3).
- Siregar, N. I., & Aziz, A. (2012). *Model Pendidikan Karakter di SMA Swasta Brigjen Katamso Medan*.
- Tarigan, U., & Suriadi, A. (2007). *Fungsi Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Aceh Timur*.
- Tarigan, U., & Harahap, B. (2006). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang surat Izin Tempat Usaha (SITU) di Kabupaten Gayo Lues*.
- Nasution, I., & Tarigan, U. (2017). *Analisis Pemilihan Kepala Desa Serentak Terhadap Demokrasi Local di Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang (Studi Kasus Pada Kantor Kepala Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang)*.
- Dewi, W. C. (2020). *Pengaruh Likuiditas Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Telekomunikasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018 (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Sembiring, W. M. (2023). *Peranan Babinsa (Bintara Pembina Desa) Koramil 0201/Medan Komando Rayon Militer 11/Md dalam Pembinaan Kenakalan Remaja di Kecamatan Medan Deli*.
- Tarigan, U. (2004). *Peranan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Administrasi Pendidikan di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 1 Binjai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Wibowo, H. T., Tarigan, R. S., & Mukmin, A. A. (2022). *APLIKASI MARKETPLACE PENDAMPING WISATA DENGAN API MAPS BERBASIS MOBILE DAN WEB*. Retrieved from osf.io/3jpd/.
- Tarigan, U. (2012). *Evaluasi Dampak Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pengaruh Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh)*.
- Wuri Andary, R. (2015). *Komunikasi Bermedia dan Perilaku Pelajar (Studi Korelasional tentang Penggunaan Smartphone terhadap Perilaku Pelajar SMA Negeri I Medan) (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara)*.
- Tarigan, U. (2016). *Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Selatan Tahun 2015 di Kecamatan Torgamba (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Berutu, B. R. (2019). *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Mungkur Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat*.
- Rejeki, R. (2019). *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Pokan Baru Kecamatan Hutabayu Raja Kabupaten Simalungun (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Santoso, M. H. (2021). *Laporan Kerja Praktek Sistem Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru Berbasis Web pada SMA Swasta Persatuan Amal Bakti (PAB) 8 Saentis*.

- Muda, I., & Lubis, Y. A. (2023). Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Smart City (Studi Kasus di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan).
- Muda, I., & Dewi, R. (2013). Model Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama di Kecamatan Sipirok Tapanuli Selatan.
- Muda, I., Harahap, R. H., Amin, M., & Kusmanto, H. (2022, November). Problems of the exploitation policy of children of street beggars in Medan city. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2659, No. 1). AIP Publishing.
- Tarigan, U. (2004). Hubungan Kemampuan Manajemen Penyuluhan Lapangan Keluarga Berencana dan Efektivitas Pencapaian Program Keluarga Berencana di Kabupaten Aceh Tenggara.
- Tarigan, U., & Dewi, R. (2018). Evaluasi Prosedur Pelayanan KTP Elektronik di Kantor Camat Kecamatan Medan Belawan Kota Medan.
- Ramadhani, M. R., & Syarif, Y. (2022). PROYEK PEMBANGUNAN SALURAN PENGHUBUNG PADA BENDUNG DI SERDANG. *Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik*, 1(3).
- Tarigan, U., & Hasibuan, M. A. (2013). Pengaruh Kepemimpinan Dalam Peningkatan Koordinasi Kerja di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Kurniawan, M. Y. (2022). Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Data, P., Tarigan, R. S., Wibowo, H. T., Azhar, S., & Wasmawi, I. (2016). *Manual Procedure Petunjuk dan Mekanisme Pengoperasian Pendaftaran Ulang Online Mahasiswa Lama*.
- Tarigan, R. S., Wasmawi, I., & Wibowo, H. T. (2020). *Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Sistem Tanda Tangan Gaji Online (SITAGO)*.
- TARIGAN, R. G., & Harahap, G. Y. (2022). LAPORAN KERJA PRAKTEK PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG MENARA BRI JL. PUTRI HIJAU NO. 2-KOTA MEDAN. *Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik*, 1(3).
- Tarigan, U., & Lubis, A. A. (2014). Tingkat Pendapatan dan Proses Pemungutan Retribusi Sampah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai.
- Siregar, N. S. S. (2017). *Modul Praktikum Publik Speaking*.
- Barus, R. K. I., & Dwiana, R. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*.
- Thamrin, M. H., & Batubara, B. M. (2014). Pengaruh Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Terhadap Tingkat Kepuasan Masyarakat di Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang.
- Harahap, G. Y. (2001). *Taman Bermain Anak-Anak di Medan Tema Arsitektur Perilaku* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Rangkuti, A. H., Siregar, T., & Munawir, Z. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*.
- Tarigan, R. S., Azhar, S., & Wibowo, H. T. (2021). *Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Aplikasi Registrasi Asrama Kampus*.
- Tarigan, U. (2013). *Politik Pembangunan Partai Politik Islam: Studi Pemikiran Politik Pembangunan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)*.
- Ritonga, S., & Batubara, B. M. (2020). Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame di Kabupaten Deli Serdang (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Tarigan, R. S. (2016). *Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Elearning*. uma. ac. id.
- Siregar, N. S. S. (2019). Analisis Disiplin Aparatur Sipil Negara Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Aceh Timur (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Deliana, M. (2013). Pengaruh Budaya Perusahaan (Corporate Culture) terhadap Kinerja Karyawan (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Muda, I., & Mustofa, W. (2023). Implementasi Prinsip Good Governance Responsitas Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Pada Kantor Camat Lingga Bayu Kabupaten Madina (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Kadir, A., & Siregar, N. S. S. (2019). Analisis Keterlambatan Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama Kota Subulussalam Tahun 2018.
- Kadir, A., & Nasution, I. (2014). Tingkat Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai Periode 2009-2014.
- Tarigan, U., & Fahmi, I. (2014). Standar Pelayanan dalam Pengurusan Surat-Surat Kependudukan di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang.
- Tarigan, R. S., & Dwiatma, G. ANALISA STEGANOGRAFI DENGAN METODE BPCS (Bit-Plane Complexity Segmentation) DAN LSB (Least Significant Bit) PADA PENGOLAHAN CITRA.
- Sianipar, G. (2019). Respon pertumbuhan dan produksi tanaman kacang tanah (*arachis hypogaea* L.) Terhadap pemberian kompos batang jagung dan pupuk organik cair limbah ampas tebu (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

- Siregar, S. A. (2018). implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 tentang Gelandangan dan Pengemisan serta Praktek Tuna Susila di Kota Medan.*
- Lubis, M. M., & Siregar, N. S. S. (2013). Analisis Implementasi Harga Pembelian Pemerintahan (HPP) Beras Terhadap Pendapatan Petani dan Pencapaian Swasembada Beras di Sumatera Utara.*
- Tarigan, R. S. (2017). Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Academic Online Campus (AOC).*
- Kadir, A., & Tarigan, U. (2018). Peranan Dinas Tata Kota dan Pertamanan dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Tanjungbalai.*
- Siregar, N. S. S. (2002). Perkembangan Filsafat Komunikasi di Indonesia.*
- Siregar, N. S. S., & Yolanda, A. (2022). Gangguan Komunikasi Self-Harm Remaja Di Masa Covid-19 Pada Desa Sei Rotan Kabupaten Deli Serdang.*
- Tarigan, U. (2004). Implementasi Kebijakan Pemekaran Kecamatan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.*